

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat**

##### **2.1.1 Partisipasi**

Pengertian partisipasi yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti ini. Nampak selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Sumarto dalam Moch Sholekhan (2014:141) menjelaskan bahwa “partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberative, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.

Menurut Janabrota Mohammad Mulyadi (2019:15) mengartikan bahwa “partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri”.

Salah satu tujuan terpenting partisipasi yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh sanoff dalam adiyoso dalam Moch Sholekhan (2014:142) bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hal suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.”

Sedangkan menurut Rusidi dalam Moch Sholekhan (2014:152) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi:

1. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan)
2. Sumbangan materi (dana, barang dan alat)
3. Sumbangan tenaga (bekerja)
4. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan

Maka dari itu, dapat disimpulkan definisi dari beberapa ahli diatas yaitu bahwa partisipasi merupakan sebuah interaksi antara kelompok dan individu tanpa adanya suatu paksaan, partisipasi juga dapat memberikan ruang untuk masyarakat dalam menyuarakan suara atau keinginannya dalam proses pengambilan keputusan yang bermaksud untuk memperoleh manfaat dari hasil keputusan yang telah dilakukan bersama dan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh kelompok ataupun dari individu itu sendiri.

### **2.1.2 Bentuk Partisipasi**

Menurut Dusseldorp (1981) (dalam Aprilia Theresia., et al, 2014 : 200 Mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat .
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

### 2.1.3 Unsur-unsur Partisipasi

Sedangkan menurut Moch Sholekhan (2014:144) membedakan bahwa partisipasi itu merupakan keikutsertaan atau keterlibatan secara sadar dan sukarela untuk berkontribusi secara fisik maupun nonfisik jika diperinci pengertian partisipasi tersebut mengandung unsur.

1. Keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan
2. Kesadaran secara suka rela
3. Adanya sikap pro aktif
4. Adanya kontribusi yang diberikan, baik secara fisik atau nonfisik, dan
5. Adanya kesepakatan-kesepakatan.

### 2.1.4 Macam-Macam Partisipasi

Menurut Nelson dalam Moch Sholekhan (2014:113) antara lain :

1. Partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal
2. Partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, atau antara masyarakat dengan pemerintahan yang diberi nama partisipasi vertikal

Hal ini sekaligus sebagai telaah analisis dari pendapat soetrisno dalam Moch Sholekhan (2014:114) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi, yaitu :

1. Partisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang untuk ditentukan oleh pemerintah.
2. Partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas, bahwa fakta yang terjadi dilapangan seringkali menunjukan bahwa sejumlah *stakeholder*

masih mempersepsikan bahwa partisipasi yang berlangsung, dimana masyarakat dikatakan partisipasi jika mereka mau mendukung secara mutlak dari program-program pemerintah yang direncanakan dan ditentukan oleh pemerintah.

#### **2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Sedangkan menurut Hetifah dalam Moch Sholekhan (2014:97)

strategi tersebut diambil dengan pertimbangan adanya tiga hambatan utama dalam penerapan partisipasi yang baik yaitu :

- a. Pertama, hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadi partisipasi. Diantaranya adalah kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung partisipasi.
- b. Kedua, hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, kurang terorganisir dan kurang memiliki kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi.
- c. Ketiga, hambatan akibat aturan kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi

#### **2.1 Tinjauan Tentang Masyarakat**

##### **2.2.1 Pengertian Masyarakat**

Ralp Linton dalam Jacobus Ranjabar (2014:18) mengemukakan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan dengan jelas.

Sedangkan menurut Mc Iver dan Page dalam Jacobus (2014:18) mengatakan bahwa “masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia”.

Selo Soemardjan dalam Jacobus (2014:18) menyatakan bahwa “masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Definisi masyarakat menurut ahli diatas, pada dasarnya isinya sama, yaitu bahwa masyarakat yang mencakup beberapa unsur Jacobus Ranjabar (2014:19) sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu system hidup bersama. System kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat suatu dengan yang lainnya.

Soerjono Soekanto (2014:130) mengelompokan masyarakat menjadi tiga jenis yaitu :

1. Masyarakat setempat
2. Masyarakat pedesaan
3. Masyarakat perkotaan

Adapun penjelasan dari kelompok masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat setempat

Dimana masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertenpat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batasan-batasan tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasar interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya. Adapun tipe-tipe masyarakat setempat yaitu:

- a. Jumlah penduduk

- b. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman
- c. Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat
- d. Organisasi masyarakat yang berangkutan.

## 2. Masyarakat pedesaan

Warga pedesaan adalah suatu masyarakat mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat desa lainnya. System kehidupan biasanya berkelompok atas dasar system kehidupan kekeluargaan.

## 3. Masyarakat perkotaan

Masyarakat perkotaan adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Ada beberapa ciri yang menonjol terhadap masyarakat kota, yaitu sebagai berikut :

- a. Kehidupan agama kurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di kota.
- b. Orang kota pada umumnya bisa mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
- c. Pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan punya batas-batas nyata.
- d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan, lebih banyak di peroleh warga kota dari pada warga desa karena pembagian kerja yang tegas tersebut diatas.



- e. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya disebut oleh masyarakat perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi berdasarkan kepentingan dari pada faktor pribadi.
- f. Jalan kehidupan yang cepat di kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu.
- g. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota karena kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh luar.

Adapun yang menjadi faktor manusia hidup bermasyarakat adalah sebagai berikut:

1. Hasrat yang berdasarkan dari naluri seseorang untuk mencari teman hidup
2. Kelemahan dari manusia yang terbilang sangat mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang diperoleh dengan cara berinteraksi dengan orang lain. sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan usaha bersama.

Maka dari itu masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem atau suatu sistem sosial, yaitu suatu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan untuk dapat saling memberikan manfaat dan juga dapat memenuhi keinginan dalam kehidupannya.

## 2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

### 2.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Adisasmita dalam Moch Sholekhan (2014:141) mengatakan bahwa “Partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat

Partisipasi masyarakat telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah disebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program atau mengembangkan kemandirian pada masyarakat demi kemajuan pembangunan. Selain itu, pemerintah manfaat merupakan pelengkap dari cakupan pada proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Secara teoritis partisipasi masyarakat ini memang mudah sekali untuk dibicarakan. Namun dalam praktek dan pelaksanaannya sering terjadi manipulasi dan rekayasa. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu baik secara internal (yaitu: motivasi, pengetahuan, pengalaman individu dan lain sebagainya), maupun secara eksternal yaitu (peran *stakeholders*, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya). Bahkan tidak sedikit proyek-proyek pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipasi, namun dalam pelaksanaannya bukan



partisipasi tapi mobilisasi, dan prosesnya bukan *bottom up tetapi top down*.

Maskun (dalam Moch Sholekhan 2014:164) bahwa “partisipasi masyarakat itu merupakan suatu partnership system dalam membangun masyarakat desa”. Dalam partisipasi masyarakat dapat ditentukan oleh beberapa faktor menurut Maskun dalam Mohammad Mulyadi (2019:96) yaitu :

1. Kebutuhan masyarakat
2. Interest masyarakat
3. Adat istiadat
4. Sifat-sifat komunal yang meningkat setiap anggota masyarakat satu sama lainnya.

### **2.3.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat**

Cohen dan Uphoff dalam Mohammad Mulyadi (2019:25) memberikan rumusan-rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai berikut: Partisipasi dalam pengambilan keputusan

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi kemanfaatan
4. Partisipasi evaluasi

Dari bentuk-bentuk partisipasi diatas dapat di jelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan.

2. Partisipasi pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan ini dapat

terwujud kontribusi. Menurut Mubyarto Kartodirdjo (dalam Mohammad Mulyadi 2019:32)

3. Partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih/positif bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Partisipasi evaluasi, adalah keikutsertaan dalam evaluasi merupakan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan.

### **2.3.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat**

Sedangkan terkait dengan partisipasi masyarakat atas kebijakan pemerintah, Maskun (dalam Moch Sholekhan 2014:164) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat tersebut terbentuknya bertingkat-tingkat, meliputi:

1. Terdapat pemahaman timbal balik antara perangkat pemerintah dengan masyarakat yang bersangkutan
2. Terdapatnya sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas niat baik dan keinginan politik dari pemerintah.
3. Tertampungnya kepentingan-kepentingan masyarakat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Terdapatnya usaha-usaha motivasi dan simulasi yang terdapat mendorong kreatififikasi masyarakat.

Untuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut, maka ada beberapa indikator yang digunakan yaitu:

1. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan
2. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan
3. Keikutsertaan masyarakat dalam kemanfaatan
4. Keikutsertaan masyarakat dalam evaluasi

Berbagai hipotesis telah diajukan dan diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan masyarakat desa. Maka dari itu semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin membuat pembangunan masyarakat desa tersebut berhasil. Begitupun sebaliknya semakin rendah partisipasi masyarakat, maka akan semakin membuat pembangunan masyarakat desa tidak berhasil.

#### **2.3.4 Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat**

Menurut Moch Sholekhan (2014:143) yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu :

1. faktor internal, yaitu motivasi, pengetahuan, pengalaman individu.
2. Faktor eksternal, meliputi peran stakeholder, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya.

#### **2.5.5 Prinsip Partisipasi Masyarakat**

Sangat disadari bahwa pengembangan partisipasi masyarakat itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh yang menyebabkan formalisasi partisipasi menjadi sangat bervariasi dengan satu dan lainnya.

Pengetian partisipasi itu mengandung pengertian yang bergerak dinamis dalam suatu proses perkembangan. Beberapa prinsip dasar pengembangan partisipasi masyarakat tersebut Moch Sholekhan (2014:153), diantaranya dapat disebut sebagai berikut:

1. Kebersamaan
2. Tumbuh dari bawah
3. Kepercayaan dan keterbukaan

Dari tiga prinsip dasar diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Kebersamaan

Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, tindakan dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen, baik struktural maupun kultural secara vertical ataupun horizontal. Partisipasi muncul berdasarkan consesnsus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses penganturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasiaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.

2. Tumbuh dari bawah

Partisipasi itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari bawah (top down) atau dikendalikan oleh individua atau kelompok melalui

mekanisme kekuasaan. Partisipasi itu tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, partisipasi itu merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan penyelenggaraan sesuatu kegiatan.

### 3. Kepercayaan dan keterbukaan

Kunci sukses partisipasi adalah membutuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai peran yang sangat penting hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek akan tetapi juga berperan sebagai subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan kesediaan secara ikhlas dari seseorang untuk membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerahnya, karena partisipasi yang dilakukan dengan ikhlas (sukarela) akan membuat masyarakat merasa turut menjadi bagian dari kegiatan tersebut.

(Mohammad Mulyadi 2019:24)

## **2.3 Tinjauan Tentang Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)**

### **2.4.1 Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)**

Tempat penampungan sampah sementara (TPS) merupakan sarana yang harus dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang baik, wajib dipenuhi apabila pemerintah daerah hendak menanggulangi masalah sampah di daerahnya. Peran Tempat penampungan sampah sementara (TPS) sangat penting bagi masyarakat maupun bagi pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan karena sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), maka terlebih dahulu diangkut ke tempat penampungan sampah sementara (TPS), sehingga memudahkan masyarakat untuk membuang sampah. Ketersediaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) di setiap daerah baik desa, kecamatan, maupun kota/kabupaten sangat diperlukan untuk membantu penanganan masalah sampah.

Setyo Murti dalam Damanhuri (2019:123) menjelaskan bahwa: Tempat sebelum sampah diangkut ketempat pandaur ulang, pengelolaan dan atau tempat pengelolaan tempat terpadu. Sedangkan Tempat Penampungan sampah menurut Damanhuri (2019:123):

TPS merupakan suatu bangunan atau tempat yang digunakan untuk memindahkan sampah dan gerobak atau alat pengumpul lainnya ke landasan ke wadah kontainer atau langsung ke truk pengangkut sampah.

Dari pendapat setyomurti dan Damanhuri dapat disimpulkan bahwa TPS adalah tempat sebelum diangkutnya sampah menuju tempat pembuangan akhir, yang sebelumnya melalui proses pengangkutan oleh masyarakat menggunakan gerobak atau alat sejenisnya.



Selanjutnya Setyomurti dalam Damanhuri (2019:123) menjelaskan macam-macam TPS sebagai berikut :

a. Tempat penampungan sementara (TPS):

Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tidak terdapat kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah.

b. Tempat pengolahan sampah 3R (TPS-3R):

Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan , penggunaan ulang dan pendaur ulang (pengolahan) sampah skala kawasan. Unitr ini pad: dasarnya diposisikan sebagai fasilitas yang dikelola oleh masyarakat (berbasis masyarakat)

c. Stasiun peralihan antara (SPA):

Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar, diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA yang jaraknya lebih dari 25 km, dilengkapi dengan fasilitas reduksi volume sampah dengan proses pemadatan sampah. Fasilitas ini dikelola oleh institusi seperti Dinas Kebersihan.

d. Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST):

Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolah dan pemrosesan akhir, beskala pelayanan kota, berbasis institusi (dioperasikan oleh pengelola kota atau swasta yang ditugaskan). Fasilitas ini identik

dengan konsep *Material Recovery Facility (MRF)* yang banyak dikemukakan oleh literatur negara maju.

#### **2.4.2 Tujuan Program Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)**

Tujuan dari Program Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) adalah memiliki beberapa keunggulan lingkungan karena penggunaan TPS memungkinkan pengurangan jumlah kendaraan pengangkut sampah, selain itu TPS memungkinkan mengurangi tempat pembuangan sampah ilegal dan memfasilitasi penentuan tempat pembuangan sampah dilokasi terpencil sehingga mampu menghindari dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembuangan sampah. Oleh karena itu TPS memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah (Esht dkk.,2007).

Peraturan Presiden Indonesia No.97 Tahun 2017 yang menjadi peta jalan menuju Indonesia Bersih Tanpa Sampah 2025. Untuk mencapai misi tersebut, pemerintah, pelaku bisnis, serta masyarakat umum diwajibkan untuk membuat program kerja yang selaras dan mendukung terwujudnya Indonesia Bersih Sampah 2025.

#### **2.4.3 Penggolongan Sampah Menurut Sumbernya**

Menurut Gilbert dalam Komang Ayu (2008 : 19) sumber-sumber timbulan sampah yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Sampah dari pemukiman penduduk

2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan
3. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah
4. Sampah dari industri
5. Sampah pertanian

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Sampah dari pemukiman penduduk

Jenis sampah yang dihasilkan dari pemukiman penduduk cenderung bersifat organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, plastik, maupun yang lainnya yang dihasilkan dari sampah rumah tangga.

2. Sampah dari tempat umum dan perdagangan

Tempat umum dapat diartikan sebagai tempat dimana banyak orang berkumpul melakukan suatu kegiatan. Tempat-tempat inilah yang memungkinkan adanya sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut termasuk tempat perdagangan seperti pasar.

Jenis sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat umum dan perdagangan bermacam-macam diantaranya sisa-sisa makanan, sisa sayuran-sayuran, sisa buah-buahan, kaleng-kaleng, sampah kering, serta sampah lainnya.

3. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah dalam hal ini dapat berupa tempat hiburan umum, masjid, rumah sakit, perkantoran, dan sarana pemerintahan lainnya yang dapat menghasilkan sampah kering maupun sampah basah.

#### 4. Sampah dari industri

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri suatu pabrik-pabrik atau perusahaan dapat berupa sampah bersifat kering, sampah yang bersifat basah, sampah kering abu, dan limbah pabrik.

#### 5. Sampah pertanian

Sampah yang dihasilkan dari hasil tanaman ataupun peternakan misalnya sampah sisa sayuran, sampah dari kebun, kandang, maupun ladang.

### 2.4.4 Jenis-Jenis Sampah

Berdasarkan asalnya, sampah padat pada digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Sampah Organik

Yang dimaksud dengan sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati. Sampah organik sangat mudah terurai dengan secara alami. Yang termasuk sampah organik yaitu sampah rumah tangga, diantaranya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, sayuran, plastik, dan lain-lain.

#### 2. Sampah anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat nonhayati. Sampah anorganik diantaranya yaitu sampah logam, sampah plastik, sampah kertas, sampah deterjen yang dapat terurai dalam waktu yang cukup lama.

Sedangkan berdasarkan keadaan fisiknya sampah dapat digolongkan sebagai berikut:

#### 1.sampah basah (garbage)

Sampah basah dapat digolongkan dari sisa-sisa pengolahan ataupun sisa-sisa makanan dari sampah rumah tangga seperti sayur mayur, sampah yang mempunyai sifat mudah membusuk. Dan sifat umumnya yaitu mengandung air dan cepat membusuk sehingga proses penguraiannya lebih cepat.

#### 2.sampah Kering (rubbish)

Sampah kering dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis diantaranya yaitu:

- a. Golongan sampah tak lapuk, sampah jenis ini tidak akan bisa lapuk secara alami harus dilakukan dengan proses-proses tertentu. Contohnya yaitu kaca dan miki.
- b. Sampah golongan tak mudah lapuk, sampah jenis ini masih bisa lapuk atau terurai hanya saja membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlahan-lahan secara alami. Contohnya seperti kayu, kerta.

### 2.4.5 Faktor-faktor yang Memengaruhi Jumlah Sampah

#### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk bergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin besar penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang menampung sampah kurang. Semakin

meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya.

2. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai.

Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat jika dibandingkan dengan truk.

3. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali. Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi, sampah yang tertinggal sedikit.

4. Faktor geografis.

Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah.

5. Faktor waktu.

Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah per hari bervariasi menurut waktu. Contoh, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak dari pada jumlah di pagi hari, sedangkan sampah di daerah pedesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu.

6. Faktor musim

Pada musim hujan sampah mungkin akan tersangkut pada selokan pintu air, atau penyaringan air limbah.



7. Faktor sosial ekonomi dan budaya.

Contoh, adat istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat.

8. Kebiasaan masyarakat

Contoh, jika seseorang suka mengonsumsi satu jenis makanan atau tanaman sampah makanan itu akan meningkat.

9. Kemajuan teknologi.

Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat.

Contoh, plastik, kardus, rongsokan, AC, TV, kulkas, dan sebagainya.

10. Jenis sampah.

Makin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin kompleks pula macam dan jenis sampahnya

#### **2.4.6 Tahap-Tahap Penertiban Tempat Penampungan Sampah Sementara**

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 48 disebutkan bahwa dalam penanganan sampah dilakukan dengan cara :

1. Pemilahan

Pemilihan sampah dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya, pengelolaan kawasan, pengelolaan fasilitas dan pemerintah Daerah Kabupaten, melalui kegiatan pengelompokan sampah:

- a. Penyediaan tempat sampah organik dan non-organik untuk skala keluarga.
- b. Penyediaan lima jenis sarana pemilahan sampah untuk skala kawasan dan fasilitas, terdiri atas:

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Sampah yang mudah terurai.
3. Sampah yang dapat digunakan kembali.
4. Sampah yang dapat didaur ulang, dan
5. Sampah lainnya.

## 2. Pengumpulan

Pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST.

Pengumpulan sampah dilakukan oleh :

- a. Pengelolaan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lain.
- b. Pemerintah kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

## 3. Pengangkutan

Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, yaitu:

- a. Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
- b. Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

## 4. Pengelolaan

Pengelolaan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengelolaan sampah dilakukan oleh:

- a. Setiap orang ada sumbernya.
- b. Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lain.
- c. Pemerintah Kabupaten  
Kegiatan pengelolaan sampah terdiri dari :
  - Pemadatan
  - Pengomposan
  - Daur ulang materi, dan
  - Daur ulang energi.

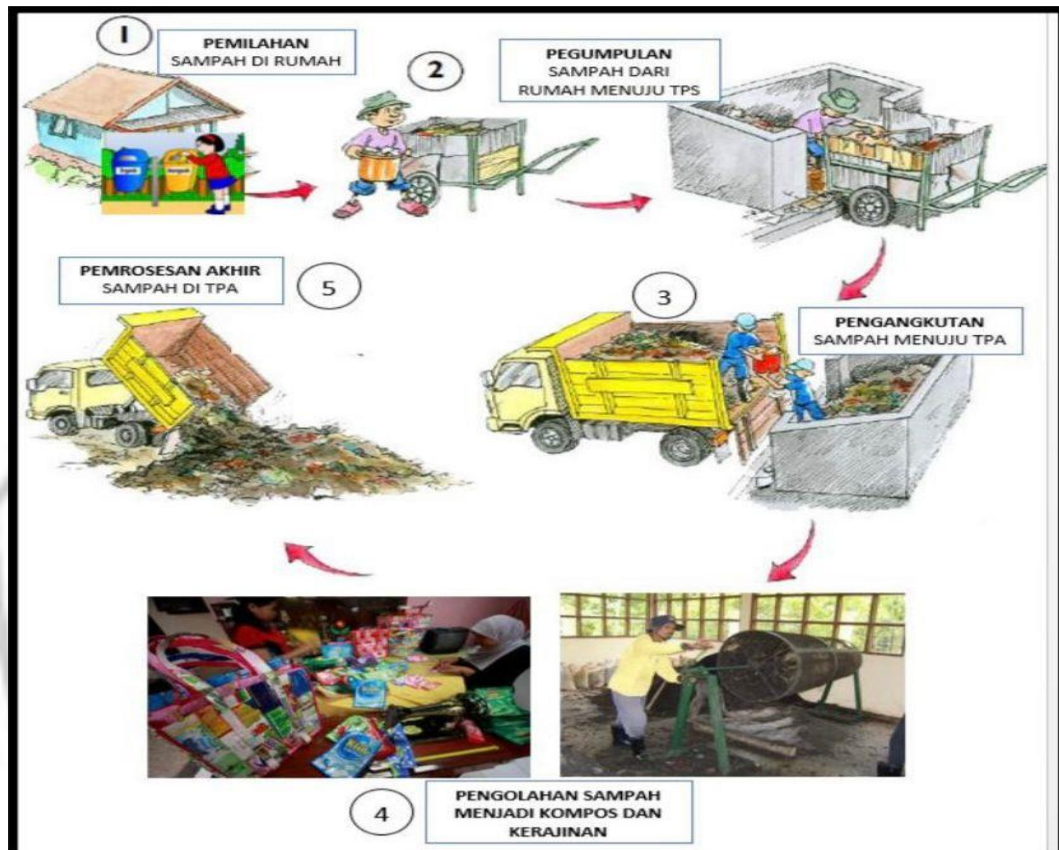
#### 5. Pemrosesan Akhir

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sampah sebelumnya kemudian lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungannya. Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.

Metode pemrosesan akhir sampah meliputi:

- a. Metode lahan uruk terkendali.
- b. Metode lahan uruk saniter.
- c. Teknologi ramah lingkungan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dalam tahap-tahap penertiban tempat penampungan sampah sementara (TPS) dapat disimpulkan melalui gambar dibawah ini :



**Gambar : 2.1**  
**Tahapan Penanganan Sampah**